BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Pasal 51 ayat (1) KUHP merupakan dasar penghapus perbuatan melawan hukumnya suatu perbuatan atau alasan pembenar karena melaksanakan perintah jabatan yang sah. Implementasinya harus didasarkan pada penilaian bahwa antara yang memerintah dan yang diperintah berada dalam dimensi kewenangan hukum publik, dilakukan secara patut dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajaran. Sedangkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP merupakan dasar penghapus pertanggungjawaban pidana kepada pelaku (alasan pemaaf) yaitu dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu didasarkan pada perintah yang sah dalam wewenangnya.
2. Penerapan Pasal 51 KUHP khususnya ayat (2) dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 416 Pk/Pid.Sus/2019 tanggal 8 Januari 2020 karena Terpidana dalam melakukannya didasarkan pada perintah berada dalam dimensi kewenangan hukum publik, yaitu Terpidana selaku

Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan itikad baik melaksanakan perintah Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat sebagai atasannya. Oleh karena itu pada diri Terpidana terdapat alasan pemaaf, yang berarti sifat melawan hukumnya ada tetapi Terpidana tidak dapat dijatuhi pidana karena terdapat hal-hal yang menjadi alasan penghapusan kesalahan.

B. Saran

Sesuai kesimpulan hasil penelitian maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam proses peradilan pidana termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi, apabila ditemukan fakta-fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena menjalankan sumpah jabatan dan dilakukan karena didasari dengan itikad baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka agar hakim tidak ragu untuk membebaskan atau melepaskan terdakwa/terpidana dari segala dakwaan yang dituduhkan kepadanya, sehingga tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
2. Meskipun penerapan Pasal 51 KUHP dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 416 Pk/Pid.Sus/2019 tanggal 8 Januari 2020 sudah tepat diterapkan, namun dalam penerapan Pasal 51

KUHP agar tetap dilakukan dengan hati-hati dan obyektif sehingga Pasal 51 KUHP tidak menjadi alat atau sarana bagi terdakwa/terpidana untuk menghindarkan diri dari hukuman.